

KOORDINASI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENGATASI KONFLIK DI KELURAHAN IMANDI DAN DESA TAMBUN KECAMATAN DUMOGA TIMUR

Rico Suhing¹
Johny Lumolos²
Neni Kumayas³

Abstrak

Kabupaten Bolaang Mongondow Memiliki Suku Dan Adat-Istiadat Yang Berbeda-Beda Namun Di Iringi Dengan Pluralitas Budaya Yang Majemuk. Sebagaimana Daerah Lainnya, Bolaang Mongondow Sebagai Salah Satu Daerah Di Indonesia Yang Terkenal Dengan Multikulturalnya Menyimpan Sejarah Tersendiri Yang Melatarbelakangi Perkembangan Sosial, Budaya Dan Politik. Sebagai Daerah Dengan Tingkat Kepedulian Daerah Yang Masih Begitu Tinggi, Bolaang Mongondow Terkenal Dengan Sejarah Yang Membentuk Struktur Masyarakatnya Sendiri, Karena Disadari Atau Tidak Terlepas Dari Nilai Moralnya, Norma-Norma Yang Menjelma Dari Kebiasaan Masyarakat Bolaang Mongondow Dengan Sendirinya Akan Terlembagakan. Numun Di Tengah-Tengah Keindahan Multikultural Budaya Di Tanah Bolaang Mongondow Masi Juga Terdapat Gesekan Social Yang Berujung Pada Konflik Sosial. Sepertinya Halnya Konflik Sosial Yang Terjadi Di Kelurahan Imandi Dan Desa Tambun. Konflik Sosial Antar Kedua Pihak Tersebut Terjadi Karena Dendam Lama, Semisal Perebutan Daerah Pertambangan Dan Ujaran Status Di Media Social Yang Saling Memprofokasikan Sehingga Memicu Masyarakat Desa Untuk Saling Dendam. Tercatat Ada Beberapa Konflik Yang Muncul Ke-Publik Di Antaranya; Rabu (2/5/2012) Tawuran Terjadi, Diawali Saling Lempar Batu Dan Saling Sabet Antara Pemuda Desa Imandi Dan Tambun. Nevri Singal, Terkena Sabetan Parang Di Kepala Bagian Belakang Sebelah Kanan. Nevri Meninggal Di Puskesmas Imandi. Senin (28/4/2015) Bentrokan Dua Warga Desa Menyebabkan Korban Luka Luka Berjumlah 24 Orang. Pandangan Ini Justru Mengarah Pada Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Karena Pemerintahlah Yang Mempunyai Otoritas Penting Dalam Mengatur Semua Aspek Kehidupan Sosial Masyarakat. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dumoga Timur Dalam Mengatasi Konflik Kelurahan Imandi Dan Desa Tambun. Dalam Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif.

Kata Kunci: Koordinasi, Konflik, Koordinasi Pemerintah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yaitu bangsa yang memiliki beraneka ragam etnik, budaya dan agama. Kemajemukan etnik, budaya dan agama itu bukanlah sesuatu yang muncul belakangan ini atau yang sengaja diciptakan kemudian, tetapi kemajemukan itu sudah ada sejak dahulu jauh sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemajemukan yang tampak turut memberikan sumbangan terhadap pembentukan bangsa ini. Munculnya istilah integrasi di tengah kemajemukan itu didasarkan pada pandangan bahwa bangsa ini berasal dari keanekaragaman.

Integrasi bangsa dalam satu interaksi sosial yang terdiri dari bermacam-macam etnik, budaya dan agama tidak dengan sendirinya berjalan lancar. Konflik atau pertentangan pada umumnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak fungsional. Suatu sistem, pranata atau suatu institusi yang sering mengalami konflik akan dinilai lebih tidak harmonis dibandingkan sistem, pranata atau institusi yang jarang mengalami konflik. Pemahaman seperti ini lebih disebabkan adanya kecenderungan dari kebanyakan orang untuk memilih strategi hidup yang lebih akomodatif daripada harus memakai jalan yang sering menempatkan orang dalam posisi yang saling kontradiktif. Kabupaten Bolaang Mongondow

Tinjauan Pustaka

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen. Fungsi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjalin komunikasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan pekerjaan. Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian (penyatuan) tujuan dan kegiatan perusahaan pada satuan yang

memiliki suku dan adat-istiadat yang berbeda-beda namun di iringi dengan pluralitas budaya yang majemuk. Sebagaimana daerah lainnya, Bolaang Mongondow sebagai salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan multikulturalnya menyimpan sejarah tersendiri yang melatarbelakangi perkembangan sosial, budaya dan politik. Sebagai daerah dengan tingkat kepedulian daerah yang masih begitu tinggi, Bolaang Mongondow terkenal dengan sejarah yang membentuk struktur masyarakatnya sendiri, karena disadari atau tidak terlepas dari nilai moralnya, norma-norma yang menjelma dari kebiasaan masyarakat Bolaang Mongondow dengan sendirinya akan terlembagakan. Numun di tengah-tengah keindahan multikultural budaya di tanah Bolaang Mongondow masi juga terdapat gesekan social yang berujung pada konflik social antar Desa dan Kelurahan.

Seperti halnya konflik yang terjadi di Kecamatan Dumoga Timur Kelurahan Imandi dan Desa Tambun Induk. Konflik di Desa Tambun dan Kelurahan Imandi sudah terjadi sejak dua dekade terakhir ini. Daerah Dumoga merupakan daerah pertambangan maka dari itu masyarakat sangat keras. Konflik di Desa tambun dan Kelurahan Imandi sudah menjadi budaya dan sering terjadi. terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Andini (2010:1)

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terry (2006:23)

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *the principle and practice of management* koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Handyaningrat (2002:54)

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif Handoko (2003:195). Pendapat di atas menunjukkan bahwa koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Proses koordinasi dilakukan untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Handoko (2003:196) fungsi koordinasi yaitu karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Handyaningrat (2005:88) bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handyaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak

bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Terdapat 3 (tiga) tujuan koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh James D. Thompson Handoko (2003:196), yaitu: pertama, saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bilah satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir, kedua saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja, dan ketiga saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Lebih lanjut Handoko (2003:196), juga menyebutkan bahwa derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

- a) Menurut Hasibuan (2007:86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu: koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya, dan
- b) koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan

penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Menurut Hasibuan (2007:87), terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi, yaitu: koordinasi adalah dinamis bukan statis, b).koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran dan

c) koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Asas koordinasi adalah asas skala (hirarki) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Tegasnya, asas hirarki ini bahwa setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya.

Konsep Pemerintah

Pemerintah atau Government dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Konsep pemerintah berasal dari kata dalam bahasa Yunani, kubernan atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan (Surbakti 2007: 167). Memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan

masyarakat dan mengelola atau mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemerintah, dengan demikian, berupa pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka menapai tujuan masyarakat dan negara (Handoyo 2010: 81). Istilah yang lebih dinamis dari pemerintah adalah pemerintahan.

Ndraha (dalam Handoyo 2010: 82) mendefinisikan pemerintahan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen (produk-produk pemerintahan) akan pelayanan publik dan pelayanan sipil. Dengan kata lain, pemerintahan adalah suatu kegiatan atau proses penyediaan dan distribusi layanan publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan.

Dalam Handoyo (2010) Pemerintah sebagai subjek hukum positif berkedudukan sebagai lembaga istimewa di tengah-tengah sebagai subjek hukum lainnya karena memiliki kekuasaan (power) dengan berbagai nilai yang sah dan ruang yang sangat luas untuk bertindak secara bebas menurut kehendak sendiri (Ndraha 2003: 427).

Menurut W.S Sayre (1960:12) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977:73), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Konsep Konflik

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Kata konflik berasal dari bahasa latin yaitu configure yang artinya saling memukul. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, pertentangan. Konflik adalah suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi didalam masyarakat maupun negara. Pengertian konflik secara umum adalah suatu keadaan yang timbul dari macam bentuk hubungan antara manusia yang mengandung sifat berlawanan dalam mencapai suatu sifat.

konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara negatif pihak lain. Robbins dalam Sopiah (2008:12). Selanjutnya dalam konflik terbuka seperti perang, pihak yang berkonflik dapat memanipulasi prasangka untuk mencapai tujuan politik. Perang yang berkepanjangan dapat terus meningkatkan dan mempertahankan prasangka. Green dalam Idhamsyah (2008:107)

Karl Marx dalam, Nasrullah Nasir (2008:20) berpendapat bahwa konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatankekuatan produksi. Karenanya, begitu kekuatan-kekuatan ini dikembalikan kepada seluruh masyarakat, maka konflik dasar tersebut akan dapat dihapuskan.

Max Weber dalam, Nasrullah Nasir (2008:20) berpendapat bahwa ia percayapertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tidak dapat dihilangkan. Dalam suatu tipe masyarakat masa depan, baik kapitalis, sosialis atau tipelainnya orang akan

tetap selalu bertarung dalam memperebutkan berbagai sumber daya. Karena itu Weber menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri pamanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks, walaupun tentu saja akan mengambil bentuk dan juga tingkat kekerasan yang secara substansial sangat bervariasi. Soerjono Soekanto dalam, Abu Ahmadi (2009:282) konflik adalah suatu proses sosial dimana orang perseorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

Gillin dan Gillin dalam, Abu Ahmadi (2009:283) mendefinisikan konflik adalah sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan (Oppositional proces) artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik emosi, kebudayaan dan perilaku.

Konflik tidak akan bersifat ideologis, yakni dia tidak mengawali dengan pandangan politis bahwa konflik baik atau buruk. Dia mengatakan bahwa dia memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistik, yakni bahwa konflik adalah proses sentral dalam kehidupan. Collins dalam George Ritzer (2011:33) Selanjutnya bahwa konflik yang terjadi didalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, melainkan dapat pula menimbulkan dampak positif. Coser dalam Ambo Upe (2010:55) Tahapan Perkembangan Konflik

Menurut Sutarto Wijono (2012:232-234) atas dasar pemahaman bahwa konflik adalah proses yang dinamis dan bukan statis atau kaku yang berarti

konflik itu dapat berubah ubah mengikuti perkembangan hal-hal yang terjadi ketika konflik. Maka konsekuensinya terjadinya konflik dapat digambarkan melalui proses perkembangannya. Proses terjadinya konflik melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Kondisi yang mendahului, sebagai penyebab terjadinya konflik.
2. Konflik yang dapat diamati jika terjadi serangkaian gejala pada tahap pertama tadi, hal ini memberikan sebuah gambaran tentang kondisi yang terancam bahkan menimbulkan suasana impersonal yang tidak diinginkan.
3. Munculnya perilaku akibat konflik itu maka muncul sebuah tindakan misalnya kompetensi, debat, untuk tujuan-tujuan mengurangi konflik atau malah lebih mempertajam konflik itu.
4. Penyelesaian atau penekanan konflik. Kemungkinan konflik itu ditekan atau diselesaikan tergantung kemampuan mengorganisir masalah tersebut. Hanya saja jika konflik itu ditekan yang akan terjadi bahaya lain, bisa saja suatu saat muncul kembali ketika situasi memungkinkan, tetapi jika konflik itu diselesaikan dengan memuaskan berbagai pihak yang bertikai maka kemungkinan lahirnya konflik yang sama masalahnya sangat kecil.

Selanjutnya Dinamika konflik adalah suatu pergerakan secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam diri konflik itu mengikuti alur perkembangan yang terjadi ketika konflik itu terjadi. Sebuah konflik manifest diawali dari konflik laten yang tertumpuk lama dan terpendam dalam diri individu, interpersonal/kelompok,

Nanang Martono (2011:228) menyebutkan bahwa akar tumbuhnya sebuah pergerakan itu timbul berawal dari faktor kepribadian dari pengikut gerakan sosial (red: konflik warga) tersebut. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan akar pergerakan tersebut, yaitu:

Pertama, teori ketidakpuasan (discontent theory). Teori ini menyatakan bahwa akar munculnya gerakan sosial terletak pada perasaan ketidakpuasan. Orang yang merasakan hidupnya nyaman dan puas, cenderung kurang menaruh perhatian pada gerakan sosial ini. Sedangkan orang atau kelompok akan melakukan sebuah tindakan apabila ia merasa dalam dirinya mendapatkan rasa yang tidak puas dan tertekan. Sebuah konflik antar warga terjadi karena adanya ketimpangan yang menyebabkan kelompok lainnya merasa tertekan sehingga rasa yang bisa untuk memuaskan diri dari lawan kelompoknya adalah melakukan perlawanan.

Kedua, teori ketidakmampuan penyesuaian diri pribadi (personal maladjustment theory). Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan tempat untuk menyalurkan kegagalan pribadi. Orang yang kecewa dan gagal lebih tertarik untuk ikut serta dalam gerakan sosial daripada orang yang sudah merasakan puas dan senang.

Dalam konflik warga juga terjadi demikian, warga yang tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan turut serta dalam sebuah konflik demi untuk membalas sebuah kegagalan pribadi dan kekecewaan.

Ketiga, teori Proses-Politik. Teori ini berkaitan dengan Teori Mobilitas Sumber Daya. Pendekatan teori proses-

politik menekankan pada peluang-peluang bagi gerakan yang diciptakan oleh proses politik dan sosial yang lebih besar. Pada tingkatan ini sangatlah berbahaya ketika konflik antar warga itu telah terjadi. Adanya muatan-muatan politik dalam sebuah konflik akan menjadikan konflik itu semakin kompleks, tidak terarah sehingga isu-isu yang berkembang dalam konflik akan selalu berubah-ubah sesuai dengan sponsor politik tersebut.

Gillin dan Gillin dalam, Abu Ahmadi (2009:288) Menjelaskan ada tiga macam bentuk pengendalian konflik sosial sebagai berikut:

1. Konsiliasi
2. Mediasi
3. Arbitrasi

Peran pihak ketiga sangat tepat dilaksanakan pada sebuah konflik yang berlangsung lama terutama apabila terjadi kebuntuan dalam mencapai penyelesaian konflik. Gillin mengatakan bahwa keadaan buntu tersebut membuat pihak yang saling bertikai berpandangan bahwa mereka tidak bisa menang dengan berperang, tetapi tidak juga memiliki kecenderungan untuk mencari perdamaian. Dalam keadaan inilah pihak ketiga dibutuhkan untuk memiliki inisiatif guna mencari perdamaian, yaitu menjadi pemimpin sidang ataupun mediator dalam proses negosiasi untuk menghilangkan kebuntuan yang terjadi. penyelesaian konflik.

Gillin mengatakan bahwa keadaan buntu tersebut membuat pihak yang saling bertikai berpandangan bahwa mereka tidak bisa menang dengan berperang, tetapi tidak juga memiliki kecenderungan untuk mencari perdamaian.

Dalam keadaan inilah pihak ketiga dibutuhkan untuk memiliki inisiatif

guna mencari perdamaian, yaitu menjadi pemimpin sidang ataupun mediator dalam proses negosiasi untuk menghilangkan kebuntuan yang terjadi. Mediasi merupakan upaya menyelesaikan konflik secara damai, yaitu bersifat tidak memaksa (noncoerceive) dan tidak memakai kekerasan (nonviolence).

Mediasi bersifat sukarela, mereka harus diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, hal ini menurut Wijono biasa dikenal dengan kenetralan dan imparsialitas pihak ketiga. Netral di sini bukan hanya sekedar tidak memihak akan tetapi juga bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi.

Dalam arbitrase, pihak ketiga (pendamai) yang dipercaya oleh pihak-pihak yang bertentangan/berkonflik itu, setelah mendengarkan masing-masing pihak mengemukakan masalahnya, maka si arbitrator "mengambil keputusan dan memberikan solusi atau penyelesaiannya, yang "harus" ditaati oleh semua pihak yang berkonflik.¹⁷ Penyelesaian konflik melalui jalan arbitrase mungkin lebih cepat diusahakan, namun biasanya tidak lestari. Apalagi kalau ada pihak yang merasa dirugikan, dikalahkan atau merasa bahwa kepentingannya diindahkan. Sebaliknya, mediasi adalah suatu cara intervensi dalam konflik dimana mediator (fasilitator) dalam konflik ini juga harus mendapat kepercayaan dari pihak yang berkonflik. Upaya penyelesaian konflik antar masyarakat yang ada di Desa Tumbun Induk dan Kelurahan Imandi yaitu melalui jalan mediasi. Pihak kepolisian, TNI Kabupaten Bolaang Mongondou dan pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta pemerintah kelurahan sebagai mediator kemudian menengahkan kedua

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

belah pihak, lalu diikat melalui perjanjian damai antara kedua kesepakatan desa tersebut

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Moleong (2007:6) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa atau kejadian sebenarnya dilapangan. peneliti tertarik meneliti bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah kecamatan dumoga timur dalam mengatasi konflik kelurahan imandi dan desa tambun dengan menggunakan kajian teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan, (2007:89-87) serta teori konflik dari Gillin dan Gillin dalam,

Abu Ahmadi (2009:283) sebagai berikut:

Koordinasi Vertikal: Adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya. Unit-unit kerja yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Tambun Induk, Tambun Barat, Kelurahan Imandi dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada konteks koordinasi vertikal peneliti melihat yang dilakukan pemerintah kecamatan dumoga timur dalam penyatuan dan pengarahan antara unit-unit kerja pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam mengatasi konflik tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah: Sosialisasi dan musyawara damai, komunikasi sosial dalam setiap hajatan, melakukan koordinasi dengan bupati bolaang mongondouw serta upaya mengajak tokoh-tokoh masyarakat desa terut menjaga ketentraman.

Koordinasi Horisontal: Adalah Kegiatan-kegiatan pemerintah kecamatan dalam mengkoordinasikan atau penyatuan, tindakan-tindakan pengarahan dengan lintas lembaga organisasi pada tingkatan unit kerja yang sama. Lintas lembaga organisasi yang dimaksud adalah pihak aparat keamanan yaitu Kepolisian Kecamatan Dumoga Timur, dan TNI.

Pada Koordinasi Horisontal peneliti melihat koordinasi Pemerintah Kecamatan Dumoga Timur dengan pihak Kepolisian, TNI untuk menjaga dan memastikan jalannya keamanan antara Desa Tambun Induk, Tambun Barat dan Kelurahan Imandi. Penyatuan tindakan-tindakan pengarahan yang dimaksud adalah: Koordinasi dengan

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

kepolisian Resor Kotamobagu untuk mengeluarkan maklumat tentang penanganan konflik, penjagaan pos perbatasan 1X24 jam, Koordinasi dengan kepolisian dan rayon militer kecamatan untuk mengamankan senjata tajam, senapan angin, pana wayer, minuman keras, knalpot racing serta menjaga keamanan dan ketentraman setiap hajatan.

Konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik sosial melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan ada pengambilan keputusan yang adil antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam konteks penanganan konflik Kelurahan Imandi dan Desa Tambun lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Desa, Kepolisian sektor Kecamatan dan Rayon militer Kecamatan Dumoga Timur.

Pengambilan keputusan dari lembaga-lembaga tersebut adalah melakukan diskusi dan diputuskan lewat konsensus bersama dengan hasil akhir adalah melakukan sosialisasi dengan pemeritah kecamatan, kelurahan dan desa tentang dilarang membawa atau menggunakan senjata tajam, dilarang melakukan pesta minuman keras pada setiap hajatan serta dilarang kendaraan bermotor menggunakan Knalpot Racing

Mediasi adalah pengendalian konflik sosial yang dilakukan antara kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga dalam pengendalian konflik Kelurahan Imandi dan Desa Tambun adalah Tokoh-tokoh masyarakat dan Tokoh adat. Pada konteks mediasi konflik Kelurahan Imandi dan Desa Tambun adalah Upaya damai yang digagas oleh tokoh-tokoh

tersebut sebagai mediator dan disepakati bersama kedua pihak dan pemerintah serta pihak keamanan yakni deklarasi damai.

informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan apa dibutuhkan oleh peneliti. Oleh sebab itu untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian, maka ke-6 informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Camat Dumoga Timur 1 orang
2. Lurah Imandi 1 orang
3. Kepala Desa Tambun 1 orang
4. Kapolsek/Dandramil Dumoga Timur 2 orang
5. Tokoh-Tokoh agama 1 orang
6. Masyarakat 2 orang

Hasil Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini akan di analisis pada dua aspek tunggal dalam fokus penelitian dengan landasan kajian teori yang di kemukakan oleh Hasibuan, (2007:89-87) yakni Koordinasi Vertikal, Maksudnya adalah seperti apa kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya dalam mengatasi konflik imandi tambun, serta Koordinasi Horisontal.

Maksudnya adalah Bagaimana pemerintah kecamatan mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang

setingkat dalam mengatasi konflik imandi tambun. Koordinasi Vertikal

Pemerintah Kecamatan merupakan unsur Koordinasi dari Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat di Desa dan Kelurahan dan mempunyai tugas membina Desa/Kelurahan. Pemerintah Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berpedoman pada peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kecamatan bahwa camat mempunyai amanat umum yakni "Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum" Serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Pasal 10 Tentang Kecamatan "Camat sebagai penanggungjawab Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor dan/atau Komando Rayon Militer" maka camat diuntut untuk melakukan tugas koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Koordinasi Horisontal

Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan dari pada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja lain. Jadi adanya saling

ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.

Di sisi lain Koordinasi memiliki fungsi sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan sinkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Selaras dengan itu maka pemerintah kecamatan perlu melakukan koordinasi dengan pihak di bawahnya guna menjamin prinsip Koordinasi berjalan dengan baik.

Dalam Konteks Kordinasi Pemerintah kecamatan dalam mengatasi konflik di kelurahan imandi dan tambun kecamatan dumoga timur maka Koordinasi Horisontal sangat di butuhkan. Koordinasi Horisontal di maksudkan agar supaya pemerintah kecamatan dumoga timur melakukan hubungan kerja sama dengan satuan wilayah kerja yang di pimpin, seperti menjalankan tatap muka atau dialog secara rutin dengan masyarakat, menjalin kerja sama dengan lembaga adat, dan menjalin hubungan kerja sama dengan tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh agama. Pada tahap pembahasan ini peneliti akan mengfokuskan pada aspek bagaimana koordinasi horisontal yang di lakukan pemerintah kecamatan dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemuda.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dengan informan serta pengumpulan data

primer dan sekunder dan kajian pembahasan berdasarkan teori dari Hasibuan, (2007:89-87) mengenai koordinasi vertikal dan horisontal maka penelitian yang berjudul koordinasi pemerintah kecamatan dalam mengatasi konflik kelurahan imandi dan desa tambun kecamatan dumoga timur sebagai berikut:

1. Pertama dari aspek pembahasan Koordinasi Vertikal peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi vertikal memang benar terjadi akan tetapi hanya sebatas koordinasi saat menangani konflik yang sudah terjadi di lapangan, Tindakan seperti pelarangan penjualan minuman keras, pemberian sanksi tegas terhadap motor dengan kendaraan resing tidak dilakukan. Faktor ini cukup mendasarkan untuk peneliti memberikan kesimpulan bahwa koordinasi vertikal tidak cukup efektif dalam mengatasi konflik jika hanya bersifat tindakan sementara, akan tetapi harus berjalan setiap saat dengan tindakan tegas dari pemerintah kecamatan dan kepolisian.
2. Kedua Dari aspek Koordinasi Horisontal memang benar adanya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dumoga timur dengan masyarakat kelurahan imandi dan desa tambun serta para tokoh-tokoh agama, adat, dan pemuda namun hanya bersifat himbuan saja. Pemerintah kecamatan tidak menjalankan prinsip dari koordinasi yakni integrasi dan sinkronisasi guna menjalin dan mengantisipasi konflik terjadi kembali.

Saran

1. Pertama Pemerintah kecamatan dumoga timur harus memahami

benar apa yang di maksud dengan makna koordinasi. Koordinasi vertikal di mungkinkan pemerintah melakukan hubungan dengan pihak pemerintah desa dan kelurahan untuk memberikan sanksi tegas terkait dengan faktor yang menyebabkan konflik kembali terjadi. Seperti menerbitkan peraturan berupa perdes melarang penjualan minuman keras, memberikan sanksi yang tegas terhadap motor kenalpot resing. Dengan menggunakan cara tersebut Pemerintah kecamatan cukup terbantu dalam mengurangi faktor dari penyebab konflik.

2. Dan kedua pemerintah kecamatan dumoga timur harus menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi pada aspek koordinasi horisontal, seperti menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta tokoh-tokoh agama, adat dan pemuda dan harus berlaku selama konflik itu memang benar-benar selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyat, Azhar. 2003. Pokok-pokok Manajemen, Yogyakarta: PT.Pustaka Pelajar.
- Amsia, Tantowi. 2009. Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional. Bandar Lampung: katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional.
- Ahmadi, Abu. 2009. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineke Cipta
- Gunawan, Iman. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Bumi Aksa.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakakarta: CV. Haji Masagung

- Hendayaningrat, 2002, Manajemen Konflik, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, T.Hani. 2011. Manajemen, Cet-22. PT. BPFY Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2009. Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah, Cet-8. Jakarta PT. Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafii. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardalis. 2010. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet12. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Martono, Nanang. 2011. Sosiologi perubahan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo
- Persada
- Siagian, Sondang P. 1982. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Sinambela, Litjan, Poltak, 2007, Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Surianingrat, Bayu., 1981. Mengenal Ilmu Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta.
- Simon Fisher, Jawed Ludin, Dkk. 2001. Mengelola Konflik Keterampilan Dan Strategi Untuk Bertindak. UK: The British Concil.
- Wirawan. 2010. Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.
- Wijono, Sutarto. 2012. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta : Kencana
- Sumber-Sumber Lain:
- Undang-undang No. 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kota-Kotamobagu
- Undang-undang No. 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Bolaang Mongondouw Utara
- Undang-undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Bolaang Mongondouw Timur
- Undang-undang No. 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Bolaang Mongondouw Selatan
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw
- Merdika Putra Bambuena 1 Herman Nayoan 2 Maxi Egeten 3. 2015. Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dalam Mengatasi Tawuran Antar Kampung. Ilmu Pemerintahan